



Model Urban Moderative Da'wah Management untuk Internalisasi Moderasi Beragama pada Masyarakat Makassar: Studi Kasus Komite Dakwah Khusus MUI Sulawesi Selatan

The Urban Moderative Da'wah Management Model for Internalizing Religious Moderation in Makassar Communities: A Case Study of the Special Da'wah Committee of MUI South Sulawesi

Maskur Yusuf

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

*e-mail: masykur@uim-makassar.ac.id

Received: 2026-05-19; Revised: 2026-07-06; Accepted: 2026-08-08

Abstract:

The growth of urban communities and the fragmentation of religious authority driven by the expansion of digital spaces have created the need for new approaches to da'wah management. However, existing studies on religious moderation and da'wah management have generally examined these issues separately, resulting in the absence of a conceptual model that explains how religious moderation is internalized within urban communities. This study aims to analyze the management practices of the Special Da'wah Committee (Komite Dakwah Khusus [KDK]) of the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia [MUI]) of South Sulawesi in internalizing religious moderation among urban communities in Makassar. The study employed a qualitative approach using an instrumental case study design. Data were collected through semi-structured interviews, participant observation, and document analysis involving 18 informants, including KDK administrators, da'i (Islamic preachers), community leaders, and KDK congregation members. The data were analyzed using thematic analysis through iterative processes of data reduction, coding, categorization, and theme development. The findings reveal that the internalization of religious moderation is achieved not merely through the transmission of formal religious doctrines but through da'wah governance that is relational, participatory, and adaptive to the dynamics of urban society. The study proposes the Urban Moderative Da'wah Management conceptual model, which comprises four interrelated dimensions: urban socio-religious mapping, community-based relational engagement, the framing of religious moderation narratives in digital spaces, and the negotiation of religious authority within pluralistic societies. The novelty of this study lies in the development of a da'wah management model that reconceptualizes moderate da'wah as a form of relational religious governance, thereby enriching the scholarship on da'wah management, religious moderation, and urban Islamic studies.

Keywords: *Da'wah management; religious moderation; urban communities; special da'wah committee; urban moderative da'wah management*

Abstrak:

Perkembangan masyarakat urban dan fragmentasi otoritas keagamaan akibat ekspansi ruang digital menuntut pendekatan baru dalam manajemen dakwah. Namun, penelitian mengenai moderasi beragama dan manajemen dakwah umumnya masih dikaji secara terpisah sehingga

belum menghasilkan model konseptual yang menjelaskan proses internalisasi moderasi beragama pada masyarakat urban. Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen Komite Dakwah Khusus (KDK) Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam menginternalisasikan moderasi beragama pada masyarakat urban di Kota Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *instrumental case study*. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 18 informan yang terdiri atas pengurus KDK, dai, tokoh masyarakat, dan komunitas jamaah KDK. Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui proses reduksi data, pengkodean, kategorisasi, dan penarikan tema secara iteratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi moderasi beragama tidak berlangsung melalui transmisi doktrin formal semata, melainkan melalui tata kelola dakwah yang bersifat relasional, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat urban. Penelitian ini mengusulkan model konseptual *Urban Moderative Da'wah Management* yang dibangun atas empat dimensi, yaitu pemetaan sosial-keagamaan masyarakat urban, *relational engagement* berbasis komunitas, *framing* narasi moderasi beragama di ruang digital, dan negosiasi otoritas religius dalam masyarakat plural. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model manajemen dakwah yang merekonseptualisasi dakwah moderat sebagai bentuk *relational religious governance*, sehingga memperkaya kajian manajemen dakwah, moderasi beragama, dan studi Islam urban.

Kata Kunci: Manajemen dakwah; moderasi beragama; masyarakat urban; komite dakwah khusus; *urban moderative da'wah management*

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat urban kontemporer menghadirkan tantangan baru dalam relasi sosial-keagamaan yang ditandai oleh meningkatnya polarisasi identitas, eksklusivisme dakwah, dan penyebaran narasi intoleransi melalui ruang digital (Husaini & Islamy, 2022). Fenomena ini tidak hanya terjadi pada level global, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika masyarakat Muslim di Indonesia yang mengalami transformasi akibat urbanisasi, mobilitas penduduk, dan penetrasi media digital yang semakin masif (Pagar et al., 2023). Berbagai studi menunjukkan bahwa ruang urban telah menjadi arena kontestasi otoritas keagamaan, pembentukan identitas religius baru, serta berkembangnya praktik keberagamaan yang semakin beragam dan fragmentatif (Saputra & Triantoro, 2021; Hefni, 2020; Kosim et al., 2024). Dalam konteks tersebut, moderasi beragama menjadi agenda strategis untuk menjaga kohesi sosial sekaligus memperkuat praktik keberagamaan yang inklusif di tengah masyarakat plural (Juhri et al., 2023).

Kajian mengenai moderasi beragama dan dakwah pada masyarakat urban berkembang dalam beberapa kecenderungan utama. Kelompok pertama menempatkan moderasi beragama sebagai instrumen penguatan kohesi sosial melalui pendidikan Islam, kebijakan negara, kurikulum, dan program deradikalisasi (Irama & Zamzami, 2021; Prasetyanti et al., 2025; Burga & Damopolii, 2022). Kelompok kedua mengkaji transformasi dakwah digital, media sosial keagamaan, dan pergeseran otoritas religius sebagai konsekuensi berkembangnya ruang digital di masyarakat Muslim urban (Rizki & Muhdi, 2025; Aderus et al., 2024). Kelompok ketiga memandang dakwah sebagai proses komunikasi religius yang berfokus pada retorika, strategi penyampaian pesan, dan efektivitas komunikasi dai (Azizy et al., 2022; Dermawan, 2023). Sementara itu, literatur internasional memperluas pembahasan mengenai *urban Islam*, *religious governance*, dan *digital religion* dengan menekankan pentingnya organisasi

keagamaan dalam membentuk praktik keberagamaan melalui tata kelola kelembagaan, jejaring sosial, dan negosiasi otoritas religius (Fenwick, 2018; Mulya & Schäfer, 2023).

Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, penelitian-penelitian tersebut masih menyisakan kesenjangan konseptual. Kajian moderasi beragama umumnya berorientasi pada kebijakan, pendidikan, atau deradikalisasi, sedangkan studi dakwah lebih banyak menitikberatkan pada komunikasi religius maupun media digital. Akibatnya, peran manajemen organisasi dakwah sebagai mekanisme institusional dalam menginternalisasikan moderasi beragama, khususnya pada masyarakat urban, belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, kompleksitas ruang urban menuntut organisasi dakwah tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga mampu merancang strategi, membangun jejaring sosial-keagamaan, memanfaatkan media digital, dan mentransformasikan nilai-nilai keagamaan secara sistematis serta berkelanjutan (Masrur et al., 2025). Dengan demikian, dakwah perlu dipahami sebagai bentuk *religious governance* yang berperan dalam membangun praktik keberagamaan moderat (Mulya & Schäfer, 2023).

Kebutuhan tersebut tampak dalam konteks Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di kawasan Indonesia Timur yang mengalami dinamika sosial-keagamaan yang semakin kompleks. Meningkatnya kontestasi ideologi keagamaan, pengaruh dakwah digital, dan berkembangnya kecenderungan keberagamaan yang eksklusif di ruang publik menghadirkan tantangan baru bagi penguatan moderasi beragama (Syarief et al., 2023). Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan membentuk Komite Dakwah Khusus (KDK) yang secara khusus berfokus pada penguatan dakwah moderat dan pembinaan masyarakat urban. KDK resmi dilantik pada 2 April 2022 dan menjadi lembaga pertama di bawah naungan MUI tingkat provinsi yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dakwah (Muisulsel.com, 2022). Kehadirannya mencerminkan transformasi pendekatan dakwah dari model ceramah konvensional menuju pendekatan sosial, edukatif, dan komunitarian yang lebih adaptif terhadap karakteristik masyarakat urban (Fenwick, 2018).

Meskipun KDK merupakan inovasi kelembagaan yang menarik, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis praktik manajemen dakwah lembaga ini sebagai instrumen internalisasi moderasi beragama. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas moderasi beragama dalam konteks pendidikan, kebijakan negara, dan media digital, sedangkan studi dakwah cenderung berfokus pada transformasi komunikasi religius tanpa mengaitkannya dengan dimensi manajemen organisasi dan internalisasi nilai sosial-keagamaan (Fansuri, 2023; Suheri & Nurrahmawati, 2022; Setiawati et al., 2022; Zuhri et al., 2024). Kekosongan akademik tersebut menunjukkan perlunya kajian yang menempatkan organisasi dakwah sebagai aktor utama dalam membangun praktik keberagamaan moderat pada masyarakat urban.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini mengusulkan model konseptual *Urban Moderative Da'wah Management* yang menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi manajemen dakwah—meliputi pemetaan sosial-keagamaan, *relational engagement* berbasis komunitas, *framing* narasi moderasi beragama di ruang digital, dan negosiasi otoritas religius—bekerja secara terpadu dalam menginternalisasikan moderasi beragama. Berbeda

dengan penelitian terdahulu yang memandang dakwah terutama sebagai proses komunikasi religius atau media penyampaian nilai-nilai Islam, penelitian ini merekonseptualisasi dakwah sebagai bentuk *religious governance* yang mengintegrasikan dimensi organisasi, strategi, jejaring sosial, dan transformasi nilai keagamaan ke dalam satu model manajemen dakwah yang adaptif terhadap kompleksitas masyarakat urban.

Selain memberikan kontribusi empiris mengenai praktik dakwah moderat di kawasan Indonesia Timur yang masih relatif minim mendapat perhatian akademik, penelitian ini juga berkontribusi pada perluasan diskursus mengenai *religious moderation* dan *urban Islam* dalam konteks *Global South*. Studi ini menunjukkan bahwa internalisasi moderasi beragama tidak hanya berlangsung melalui instrumen negara atau pendidikan formal, tetapi juga melalui tata kelola organisasi keagamaan pada level komunitas. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik manajemen dakwah Komite Dakwah Khusus MUI Sulawesi Selatan dalam menginternalisasikan moderasi beragama pada masyarakat urban di Kota Makassar, termasuk strategi, pendekatan, dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *single instrumental case study*. Pemilihan kasus sebagai *instrumental case* mengacu pada Stake (1995), sedangkan prosedur penelitian studi kasus mengikuti kerangka yang dikembangkan oleh Yin (2018). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mendeskripsikan praktik dakwah KDK, tetapi menggunakan kasus tersebut untuk mengembangkan pemahaman konseptual mengenai model *Urban Moderative Da'wah Management*.

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar selama Januari–September 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di kawasan Indonesia Timur yang memiliki tingkat heterogenitas sosial, mobilitas penduduk, serta dinamika dakwah digital yang tinggi. Adapun Komite Dakwah Khusus (KDK) MUI Sulawesi Selatan dipilih sebagai kasus penelitian karena memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun Wahdah Islamiyah. FKUB berfokus pada penguatan kerukunan antarumat beragama melalui fasilitasi dialog lintas agama, sedangkan NU, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah merupakan organisasi kemasyarakatan Islam dengan mandat yang lebih luas dalam bidang dakwah, pendidikan, dan kaderisasi. Berbeda dengan organisasi-organisasi tersebut, KDK merupakan lembaga pertama di bawah naungan MUI tingkat provinsi di Indonesia yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dakwah moderat melalui pendekatan kelembagaan, penguatan jejaring komunitas, dan pembinaan masyarakat urban. Karakteristik tersebut menjadikan KDK sebagai kasus yang relevan untuk menjelaskan bagaimana manajemen organisasi dakwah berfungsi sebagai mekanisme internalisasi moderasi beragama sekaligus sebagai konteks empiris dalam pengembangan model konseptual *Urban Moderative Da'wah Management*.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 18 informan yang dipilih secara purposive

berdasarkan tingkat keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan yang relevan dengan aktivitas dakwah KDK. Untuk menjaga kerahasiaan identitas sekaligus meningkatkan keterlacakan data, setiap informan diberikan kode sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kode Informan Penelitian

No	Kelompok Informan	Jumlah	Kode
1	Pengurus inti KDK	6	KDK1–KDK6
2	Dai/mubalig KDK	5	D1–D5
3	Tokoh masyarakat	3	TM1–TM3
4	Komunitas/jamaah binaan	4	KM1–KM4
Total Jumlah		18	

Wawancara berlangsung selama 90–120 menit dan dilakukan secara tatap muka di kantor KDK, lokasi kegiatan dakwah, maupun ruang komunitas. Pedoman wawancara disusun secara semi-terstruktur dengan empat fokus utama, yaitu: (1) perencanaan dan pengelolaan program dakwah; (2) strategi internalisasi moderasi beragama; (3) pemanfaatan media digital dan jejaring komunitas; serta (4) tantangan dakwah pada masyarakat urban. Seluruh wawancara direkam atas persetujuan informan, kemudian ditranskripsikan secara verbatim sebelum memasuki tahap analisis.

Observasi partisipatif dilakukan pada 12 kegiatan dakwah selama periode penelitian yang mencakup pengajian komunitas, pembinaan masyarakat, diskusi keislaman, serta berbagai kegiatan sosial-keagamaan yang diselenggarakan oleh KDK. Selama proses observasi, peneliti berperan sebagai *participant-as-observer*, yaitu terlibat dalam aktivitas organisasi tanpa mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus melakukan pencatatan lapangan secara sistematis terhadap pola interaksi, strategi manajemen dakwah, dinamika kelembagaan, dan proses internalisasi moderasi beragama. Selain observasi, data juga diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap program kerja organisasi, materi dakwah, arsip kelembagaan, media sosial resmi, laporan kegiatan, serta berbagai dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan aktivitas KDK.

Analisis data dilakukan menggunakan *thematic analysis* melalui tahapan *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* (Strauss & Corbin, 1998).. Pada tahap *open coding*, peneliti mengidentifikasi unit-unit makna dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian memberikan kode awal terhadap konsep-konsep yang berulang. Selanjutnya, pada tahap *axial coding*, kode-kode yang memiliki keterkaitan dikelompokkan menjadi kategori konseptual. Tahap *selective coding* dilakukan dengan mengintegrasikan kategori tersebut menjadi tema-tema utama yang membentuk model konseptual *Urban Moderative Da'wah Management*. Untuk meningkatkan transparansi analisis, proses pembentukan tema disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ilustrasi Proses Pengkodean Data

Kutipan Data	Open Coding	Axial Coding	Kategori
“Kami memetakan dulu karakter masyarakat sebelum menentukan bentuk dakwah.”	pemetaan masyarakat	analisis kebutuhan dakwah	perencanaan dakwah
“Kami lebih banyak masuk melalui komunitas daripada ceramah besar.”	pendekatan komunitas	strategi dakwah partisipatif	implementasi dakwah

“Media sosial menjadi ruang utama menyampaikan narasi moderasi.”	dakwah digital	strategi komunikasi digital	media dakwah
“Kami harus berdialog dengan berbagai kelompok agar dakwah diterima.”	dialog lintas kelompok	negosiasi sosial-keagamaan	penguatan moderasi

Hasil pengkodean pada Tabel 2 kemudian dibandingkan secara berulang melalui proses *constant comparison* (Strauss & Corbin, 1998) hingga diperoleh kategori yang stabil. Proses analisis dilakukan secara iteratif hingga tidak ditemukan lagi kategori baru yang substantif (*theoretical saturation*). Selanjutnya, kategori-kategori tersebut diintegrasikan pada tahap *selective coding* untuk membangun tema-tema konseptual yang menjadi dasar pengembangan model penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data (*trustworthiness*), penelitian menerapkan triangulasi sumber, triangulasi metode, *member checking*, dan *peer debriefing*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari pengurus KDK, dai, tokoh masyarakat, dan jamaah binaan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui integrasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Member checking* dilakukan kepada empat informan utama (KDK1, KDK3, D2, dan TM1) yang meninjau kembali ringkasan hasil interpretasi dan menyatakan bahwa temuan penelitian telah merepresentasikan pengalaman mereka secara akurat. Selain itu, *peer debriefing* dilakukan melalui diskusi dengan dua dosen yang memiliki kepakaran pada bidang manajemen dakwah dan studi Islam untuk menguji konsistensi proses pengkodean, interpretasi data, dan pembentukan tema konseptual. Keempat teknik tersebut diterapkan secara simultan untuk meningkatkan kredibilitas (*credibility*), dependabilitas (*dependability*), konfirmabilitas (*confirmability*), dan transferabilitas (*transferability*) hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki posisi sebagai salah satu pengurus Komite Dakwah Khusus (KDK) MUI Sulawesi Selatan sehingga berperan sebagai *insider researcher* dalam konteks penelitian. Posisi tersebut memberikan akses yang lebih luas terhadap data empiris dan memungkinkan peneliti memahami dinamika organisasi secara lebih mendalam. Namun demikian, posisi tersebut juga berpotensi menimbulkan bias interpretatif. Oleh karena itu, reflektivitas dilakukan secara berkesinambungan melalui penyusunan memo reflektif selama proses pengumpulan dan analisis data, pencatatan asumsi serta kemungkinan bias personal, penerapan triangulasi sumber dan metode, pelaksanaan *member checking* kepada informan utama, serta *peer debriefing* dengan peneliti lain di bidang manajemen dakwah dan studi Islam. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi proses interpretasi, meminimalkan pengaruh subjektivitas peneliti, dan meningkatkan kredibilitas serta validitas analitis temuan penelitian mengenai praktik manajemen dakwah dan internalisasi moderasi beragama pada masyarakat urban.

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika penelitian. Seluruh informan memberikan persetujuan tertulis (*written informed consent*) sebelum proses pengumpulan data dilakukan. Kerahasiaan identitas partisipan dijaga melalui penggunaan kode informan, dan seluruh data penelitian digunakan secara eksklusif untuk kepentingan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen dakwah Komite Dakwah Khusus (KDK) Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas penyampaian ajaran agama, tetapi juga sebagai mekanisme tata kelola sosial-keagamaan dalam menginternalisasikan moderasi beragama pada masyarakat urban di Kota Makassar. Berdasarkan analisis terhadap data wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi, penelitian mengidentifikasi empat tema konseptual yang secara konsisten membentuk praktik *Urban Moderative Da'wah Management*, yaitu: (1) pemetaan sosial-keagamaan masyarakat urban (*social-religious mapping*), (2) dakwah relasional berbasis komunitas (*relational engagement*), (3) konstruksi narasi moderasi melalui media digital (*digital framing*), dan (4) negosiasi otoritas religius dalam masyarakat plural (*negotiation of religious authority*). Keempat tema tersebut diperoleh melalui proses *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*, kemudian diintegrasikan menjadi model konseptual penelitian.

Untuk memperjelas struktur temuan, sintesis hasil analisis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sintesis Temuan *Urban Moderative Da'wah Management*

Tema Konseptual	Indikator Empiris	Bukti Observasi	Bukti Wawancara	Interpretasi
<i>Social-Religious Mapping</i>	Segmentasi karakter masyarakat dan pemetaan kebutuhan dakwah	Program dakwah diselenggarakan pada komunitas yang berbeda sesuai karakter sosial-keagamaan	Pengurus KDK menjelaskan bahwa setiap program diawali dengan pemetaan karakter masyarakat (KDK1)	Dakwah disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat urban, bukan pendekatan seragam.
<i>Relational Engagement</i>	Pendekatan berbasis komunitas dan dialog partisipatif	Kegiatan dakwah berlangsung melalui diskusi komunitas, pembinaan pemuda, dan aktivitas sosial	Dai menekankan pentingnya membangun kedekatan sosial sebelum menyampaikan materi moderasi (D3)	Internalisasi moderasi berlangsung melalui relasi sosial yang dibangun secara bertahap.
<i>Digital Framing</i>	Produksi narasi moderasi melalui media digital	Pemanfaatan Instagram, YouTube, Facebook, dan WhatsApp sebagai media dakwah	Pengelola media KDK menjelaskan strategi penyusunan konten yang persuasif dan kontekstual (KDK5)	Media digital menjadi ruang strategis untuk membangun identitas Muslim moderat.
<i>Negotiation of Religious Authority</i>	Dialog dengan berbagai kelompok dan pengelolaan resistensi	Ditemukan adanya respons pro dan kontra terhadap dakwah moderat	Pengurus mengakui adanya resistensi dari kelompok yang lebih konservatif (KDK4)	Moderasi beragama merupakan hasil negosiasi sosial dalam ruang publik urban.

Sumber: Hasil analisis peneliti (2025).

Pemetaan Sosial-Keagamaan sebagai Basis Pengelolaan Dakwah Urban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan sosial-keagamaan (*social-religious mapping*) merupakan tahap awal yang menjadi dasar penyusunan strategi dakwah KDK. Seluruh informan menjelaskan bahwa masyarakat urban tidak dipandang sebagai kelompok yang homogen, melainkan sebagai komunitas dengan karakteristik sosial, tingkat literasi keagamaan, dan pola interaksi digital yang berbeda. Oleh karena itu, setiap program dakwah diawali dengan identifikasi karakter sasaran agar pendekatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing komunitas.

Seorang pengurus inti KDK menjelaskan:

“Anak-anak muda sekarang banyak belajar agama dari media sosial. Kadang mereka lebih percaya potongan video satu menit daripada pengajian langsung. Ini membuat cara pandang keagamaan mereka cepat berubah, tapi juga sering sangat hitam-putih. Kalau dakwah moderat datang hanya dalam bentuk ceramah formal, mereka biasanya tidak tertarik lagi.” (KDK1)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola keberagamaan masyarakat urban dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi informasi keagamaan melalui media digital. Kondisi tersebut mendorong KDK untuk tidak menggunakan pendekatan dakwah yang seragam, tetapi melakukan pemetaan terhadap karakter sosial-keagamaan masyarakat sebelum menentukan bentuk intervensi dakwah. Dengan demikian, moderasi beragama diposisikan sebagai proses yang harus disesuaikan dengan konteks sosial setiap komunitas.

Temuan wawancara tersebut diperkuat oleh hasil observasi partisipatif pada dua belas kegiatan dakwah yang menunjukkan bahwa aktivitas KDK tidak hanya berlangsung di masjid, tetapi juga di berbagai ruang sosial urban, seperti komunitas pemuda, diskusi publik, warung kopi, dan ruang kreatif anak muda. Pada salah satu kegiatan diskusi keagamaan di sebuah kafe di Kota Makassar, peneliti mengamati bahwa dai KDK tidak menggunakan pola ceramah satu arah, melainkan memfasilitasi dialog mengenai fenomena saling menyalahkan antarkelompok Muslim di media sosial. Sebagian besar peserta lebih aktif berbagi pengalaman keberagamaan dibandingkan hanya menerima materi secara pasif. Pola interaksi tersebut menunjukkan bahwa internalisasi moderasi beragama dibangun melalui ruang dialogis yang memungkinkan peserta merefleksikan pengalaman keberagamaannya sendiri.

Hasil dokumentasi organisasi juga memperlihatkan bahwa KDK secara sistematis mengembangkan program dakwah berdasarkan segmentasi sosial masyarakat, antara lain melalui pembinaan manajemen masjid, remaja masjid, literasi media digital, penguatan kapasitas dai muda moderat, serta podcast dengan ulama Aswaja melalui YouTube Chanel MUI Sulawesi Selatan. Dokumen program kerja menunjukkan bahwa setiap kegiatan dirancang berdasarkan karakteristik kelompok sasaran sehingga pendekatan dakwah menjadi lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika masyarakat urban.

Sintesis terhadap data wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa praktik manajemen dakwah KDK telah bergeser dari model transmisi doktrin menuju pengelolaan dakwah berbasis pemetaan sosial-keagamaan masyarakat urban. Temuan ini membentuk dimensi pertama dalam model *Urban Moderative Da'wah Management*, yaitu *Social-Religious Mapping*, yang menempatkan pemetaan karakter sosial dan keagamaan

masyarakat sebagai fondasi utama dalam proses internalisasi moderasi beragama. Dengan demikian, keberhasilan dakwah moderat tidak hanya ditentukan oleh isi pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dakwah memahami konteks sosial masyarakat yang menjadi sasaran dakwah.

Dakwah Relasional dan Internalisasi Moderasi Beragama melalui Komunitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi moderasi beragama dalam praktik dakwah Komite Dakwah Khusus (KDK) berlangsung terutama melalui pendekatan relasional berbasis komunitas (*relational engagement*). Berbeda dengan pendekatan dakwah yang berorientasi pada penyampaian doktrin secara satu arah, KDK membangun proses internalisasi moderasi beragama melalui pembentukan hubungan sosial yang intens antara dai dan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap nilai-nilai moderasi lebih efektif dibangun melalui kedekatan interpersonal, partisipasi dalam aktivitas komunitas, dan dialog yang berkelanjutan dibandingkan melalui ceramah formal semata.

Untuk memperjelas karakteristik temuan tersebut, sintesis hasil analisis disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Sintesis Temuan Dimensi *Relational Engagement*

Indikator	Bukti Observasi	Bukti Wawancara	Interpretasi
Pendekatan berbasis komunitas	Dakwah dilaksanakan melalui pengajian komunitas, pembinaan pemuda masjid, dan kegiatan sosial	Dai menjelaskan bahwa pendekatan diawali dengan membangun kedekatan sosial sebelum menyampaikan materi moderasi (D3).	Internalisasi moderasi berlangsung melalui relasi sosial yang dibangun secara bertahap.
Pola komunikasi dialogis	Diskusi berlangsung dua arah dan peserta aktif berbagi pengalaman keberagamaan	Peserta menyatakan bahwa pendekatan KDK lebih menenangkan dibanding kajian yang bersifat menghakimi (KM2).	Dialog partisipatif mendorong refleksi dan penerimaan terhadap nilai moderasi.
Resistensi terhadap dakwah moderat	Ditemukan perbedaan respons dari sebagian kelompok masyarakat terhadap pendekatan moderat	Pengurus mengakui bahwa dakwah moderat sering dianggap terlalu lunak oleh kelompok tertentu (KDK4).	Internalisasi moderasi berlangsung melalui proses negosiasi sosial dalam ruang publik urban.

Sumber: Hasil analisis peneliti (2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedekatan sosial menjadi strategi utama dalam membangun penerimaan masyarakat terhadap moderasi beragama. Seorang dai KDK menjelaskan:

“Kalau masyarakat kota merasa digurui, mereka biasanya menjauh. Karena itu kami tidak langsung bicara soal moderasi atau toleransi secara teoritis. Kami masuk dulu lewat kegiatan sosial, diskusi santai, pendampingan komunitas, baru setelah ada kedekatan mereka mulai terbuka menerima pandangan yang lebih moderat.” (D3)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa proses internalisasi moderasi beragama tidak berlangsung melalui penyampaian doktrin secara langsung, tetapi melalui pembentukan

hubungan sosial yang memungkinkan transformasi nilai terjadi secara bertahap. Dalam konteks ini, *relational engagement* berfungsi sebagai salah satu mekanisme utama yang menghubungkan aktivitas dakwah dengan proses pembentukan sikap moderat pada masyarakat urban.

Temuan wawancara tersebut diperkuat oleh hasil observasi partisipatif pada kegiatan safari dakwah komunitas, pembinaan pemuda masjid, dan diskusi keagamaan di ruang publik. Peneliti mengamati bahwa sebagian besar kegiatan tidak menggunakan pola ceramah satu arah, tetapi berlangsung dalam bentuk dialog yang memberi ruang kepada peserta untuk mengemukakan pengalaman, pertanyaan, dan pandangan mereka mengenai persoalan keagamaan. Dalam salah satu kegiatan pembinaan komunitas pemuda, dai KDK tidak secara langsung memberikan penilaian terhadap perdebatan antarkelompok Islam di media sosial, tetapi mengajak peserta mendiskusikan dampak sosial dari ujaran kebencian, polarisasi, dan praktik saling menyalahkan. Pola interaksi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran moderasi beragama dibangun melalui proses refleksi bersama, bukan melalui indoktrinasi.

Pengalaman tersebut juga dikonfirmasi oleh salah seorang anggota komunitas binaan yang menyatakan:

“Saya dulu sering ikut kajian yang isinya menyalahkan kelompok lain. Lama-lama saya merasa capek sendiri karena semua dianggap salah. Di KDK saya merasa lebih tenang karena kajiannya tidak membuat kita membenci orang lain.” (KM2)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan terhadap moderasi beragama tidak hanya dipengaruhi oleh isi materi dakwah, tetapi juga oleh pengalaman emosional dan kualitas hubungan sosial yang dibangun selama proses pembinaan. Bagi peserta, pendekatan dialogis menghadirkan ruang yang lebih aman untuk memahami perbedaan dan merefleksikan praktik keberagamaan tanpa tekanan untuk menghakimi kelompok lain.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan relasional tersebut menghadapi berbagai tantangan. Beberapa informan mengakui bahwa dakwah moderat tidak selalu diterima secara positif karena sebagian kelompok keagamaan masih memandang pendekatan dialogis sebagai bentuk kompromi terhadap prinsip-prinsip agama. Seorang pengurus KDK menjelaskan:

“Kadang ada yang bilang kami terlalu toleran atau tidak tegas dalam berdakwah. Jadi memang ada tantangan ketika dakwah moderat dianggap kurang keras dibandingkan ceramah yang viral di media sosial.” (KDK4)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik dakwah moderat berlangsung dalam situasi kontestasi otoritas keagamaan yang semakin dipengaruhi oleh ruang digital dan kompetisi narasi keislaman. Oleh karena itu, keberhasilan internalisasi moderasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas pesan dakwah, tetapi juga oleh kemampuan organisasi membangun kepercayaan sosial dan mempertahankan hubungan yang berkelanjutan dengan komunitas sasaran.

Sintesis terhadap data wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa internalisasi moderasi beragama dalam praktik KDK terutama berlangsung melalui pembentukan relasi sosial yang dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas. Temuan ini membentuk dimensi kedua dalam model *Urban Moderative Da'wah*

Management, yaitu *Relational Engagement*, yang menempatkan kedekatan sosial dan interaksi komunitarian sebagai mekanisme utama dalam mentransformasikan nilai-nilai moderasi beragama pada masyarakat urban.

Konstruksi Narasi Moderasi Beragama dalam Dakwah Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital menjadi ruang strategis dalam internalisasi moderasi beragama yang dijalankan Komite Dakwah Khusus (KDK). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana penyebarluasan materi dakwah, tetapi juga sebagai arena untuk membangun narasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan kontekstual di tengah dominasi konten keagamaan digital yang cenderung bersifat sensasional, konfrontatif, dan polarisatif. Dalam konteks ini, KDK memanfaatkan ruang digital sebagai instrumen pembentukan identitas Muslim moderat sekaligus sebagai media negosiasi wacana keagamaan pada masyarakat urban.

Untuk memperjelas karakteristik temuan tersebut, sintesis hasil analisis disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Sintesis Temuan Dimensi *Digital Framing*

Indikator	Bukti Observasi	Bukti Wawancara	Interpretasi
Produksi konten dakwah moderat	KDK secara aktif memanfaatkan Instagram, YouTube, Facebook, dan WhatsApp sebagai media dakwah	Pengelola media menjelaskan bahwa narasi dakwah disusun secara empatik dan kontekstual agar sesuai dengan karakter masyarakat urban (KDK5).	Media digital diposisikan sebagai ruang strategis untuk membangun narasi moderasi beragama.
Strategi komunikasi digital	Konten menggunakan bahasa persuasif, visual sederhana, dan tema-tema yang dekat dengan kehidupan masyarakat	Pengelola media menekankan pentingnya menghindari penyampaian yang terlalu formal dan normatif (KDK5).	Strategi komunikasi disesuaikan dengan karakteristik pengguna media digital, khususnya generasi muda urban.
Tantangan ruang digital	Ditemukan komentar yang menolak narasi moderasi dan lebih menyukai konten yang provokatif	Pengurus mengakui bahwa dakwah moderat harus bersaing dengan konten keagamaan yang lebih sensasional (KDK5).	Ruang digital merupakan arena kontestasi narasi keagamaan yang dipengaruhi oleh logika algoritma dan budaya viral.

Sumber: Hasil analisis peneliti (2025).

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa KDK secara konsisten memproduksi berbagai konten dakwah melalui Instagram, YouTube, Facebook, dan grup WhatsApp komunitas. Materi yang dipublikasikan tidak hanya berisi ceramah keagamaan, tetapi juga membahas tema-tema yang dekat dengan kehidupan masyarakat urban, seperti etika bermedia sosial, pentingnya *tabayyun*, relasi antarumat beragama, kesehatan mental, serta fenomena *toxic religiosity* di ruang digital. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa strategi dakwah digital

KDK diarahkan untuk membangun relevansi pesan keagamaan dengan pengalaman keseharian masyarakat urban.

Strategi tersebut dikonfirmasi oleh salah seorang pengelola media digital KDK yang menjelaskan:

“Kami sadar kalau dakwah digital sekarang bersaing dengan konten yang provokatif dan cepat viral. Kalau dakwah moderat terlalu formal atau terlalu berat, masyarakat urban khususnya anak muda tidak tertarik. Karena itu kami mencoba membuat narasi yang lebih empatik dan relevan dengan kehidupan mereka.” (KDK5)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan narasi dakwah digital dilakukan secara sadar dengan mempertimbangkan karakteristik audiens, pola konsumsi media, dan dinamika komunikasi digital masyarakat urban. Dalam praktiknya, tujuan utama KDK bukan hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga membangun kedekatan emosional agar nilai-nilai moderasi beragama lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Temuan wawancara tersebut diperkuat oleh hasil observasi terhadap berbagai platform media sosial KDK selama periode penelitian. Peneliti menemukan bahwa konten yang dipublikasikan cenderung menggunakan bahasa yang persuasif, visual yang sederhana, dan menghindari retorika konfrontatif maupun klaim kebenaran yang eksklusif. Interaksi antara pengelola akun dan pengguna media sosial juga berlangsung secara dialogis melalui respons terhadap pertanyaan, komentar, maupun diskusi yang berkembang pada setiap unggahan. Pola tersebut menunjukkan bahwa media digital dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan proses internalisasi moderasi berlangsung melalui dialog, bukan sekadar penyampaian informasi.

Namun demikian, hasil observasi juga memperlihatkan bahwa efektivitas dakwah moderat di ruang digital masih menghadapi berbagai tantangan. Pada beberapa unggahan ditemukan komentar yang menolak narasi moderasi beragama dan menganggap pendekatan tersebut terlalu kompromistis terhadap kelompok lain. Selain itu, konten-konten yang bersifat provokatif dan emosional cenderung memperoleh tingkat interaksi yang lebih tinggi dibandingkan konten dakwah moderat. Temuan ini menunjukkan bahwa penyebaran narasi moderasi beragama berlangsung dalam ruang digital yang dipengaruhi oleh budaya algoritmik, kompetisi perhatian (*attention economy*), dan logika viralitas yang tidak selalu mendukung penyebaran pesan-pesan keagamaan yang reflektif.

Sintesis terhadap data dokumentasi, wawancara, dan observasi menunjukkan bahwa media digital dalam praktik dakwah KDK tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi sebagai ruang strategis untuk membingkai (*framing*) narasi moderasi beragama sesuai dengan karakteristik masyarakat urban. Temuan ini membentuk dimensi ketiga dalam model *Urban Moderative Da'wah Management*, yaitu *Digital Framing*, yang menempatkan konstruksi narasi keagamaan sebagai mekanisme penting dalam membangun identitas Muslim moderat sekaligus merespons kontestasi wacana keagamaan di ruang digital.

Negosiasi Otoritas Religius dalam Tata Kelola Dakwah Masyarakat Urban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen dakwah Komite Dakwah Khusus (KDK) berlangsung dalam konteks masyarakat urban yang ditandai oleh meningkatnya fragmentasi otoritas keagamaan, berkembangnya ruang dakwah digital, dan

perubahan pola keberagamaan masyarakat. Kondisi tersebut menempatkan internalisasi moderasi beragama tidak hanya sebagai persoalan penyampaian pesan dakwah, tetapi juga sebagai proses negosiasi otoritas religius di tengah beragam sumber rujukan keagamaan yang bersaing dalam ruang publik. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi KDK bukan semata-mata bersifat teknis-organisasional, tetapi berkaitan dengan kemampuan organisasi membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap dakwah moderat.

Untuk memperjelas karakteristik temuan tersebut, sintesis hasil analisis disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Sintesis Temuan Dimensi *Negotiation of Religious Authority*

Indikator	Bukti Observasi	Bukti Wawancara	Interpretasi
Fragmentasi otoritas keagamaan	Masyarakat memperoleh rujukan keagamaan dari berbagai platform digital dan tokoh agama di media sosial	Informan menjelaskan bahwa masyarakat lebih banyak mengakses pengetahuan agama secara instan melalui media sosial dibandingkan mengikuti pembinaan komunitas (TM2).	Otoritas keagamaan tidak lagi terpusat pada lembaga formal, tetapi tersebar dalam ruang digital.
Resistensi terhadap dakwah moderat	Ditemukan perbedaan respons masyarakat terhadap narasi moderasi beragama dalam berbagai kegiatan dakwah	Pengurus mengakui bahwa dakwah moderat sering dianggap terlalu lunak oleh sebagian kelompok (KDK4).	Internalisasi moderasi berlangsung melalui proses negosiasi dengan berbagai pandangan keagamaan.
Keterbatasan kapasitas organisasi	Sebagian besar program masih bergantung pada jejaring sukarela dai dan komunitas	Pengurus menjelaskan bahwa penguatan media digital, kaderisasi dai, dan pendanaan masih menjadi tantangan organisasi (KDK6).	Keberlanjutan dakwah moderat memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan.

Sumber: Hasil analisis peneliti (2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dakwah moderat adalah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh pengetahuan agama. Beberapa informan menjelaskan bahwa masyarakat urban semakin terbiasa mengakses informasi keagamaan secara cepat melalui media sosial tanpa keterlibatan yang berkelanjutan dalam komunitas dakwah. Seorang tokoh masyarakat menjelaskan:

“Sekarang banyak orang merasa cukup belajar agama dari media sosial. Mereka mengikuti potongan ceramah yang viral tanpa mengetahui konteksnya. Akibatnya, pemahaman keagamaan sering berubah-ubah dan mudah dipengaruhi oleh informasi yang sedang ramai diperbincangkan.” (TM2)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya akses terhadap berbagai sumber informasi keagamaan telah mengubah pola pembentukan otoritas religius dalam masyarakat urban. Otoritas keagamaan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada lembaga atau

tokoh agama tertentu, tetapi dinegosiasikan melalui berbagai platform digital yang menghadirkan beragam perspektif keagamaan secara simultan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil observasi selama kegiatan dakwah KDK yang menunjukkan bahwa peserta sering membawa isu-isu keagamaan yang sebelumnya mereka peroleh dari media sosial untuk didiskusikan dalam forum pembinaan. Sebagian pertanyaan berkaitan dengan perbedaan pandangan antarkelompok Islam maupun kontroversi yang sedang berkembang di ruang digital. Dalam situasi tersebut, dai KDK tidak memberikan jawaban yang bersifat konfrontatif, tetapi memfasilitasi dialog dengan menekankan pentingnya *tabayyun*, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan argumentasi keagamaan yang proporsional. Pola ini menunjukkan bahwa internalisasi moderasi beragama berlangsung melalui proses negosiasi pemahaman keagamaan, bukan melalui penegasan otoritas secara sepihak.

Selain tantangan yang berasal dari dinamika masyarakat, hasil dokumentasi organisasi juga menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam mengembangkan dakwah moderat secara berkelanjutan. Sebagian besar aktivitas KDK masih didukung oleh jejaring sukarela para dai dan komunitas lokal, sementara penguatan kapasitas media digital, kaderisasi dai moderat, dan dukungan pendanaan organisasi belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan organisasi dalam memperluas jangkauan dakwah moderat pada masyarakat urban yang semakin kompleks.

Temuan tersebut dikonfirmasi oleh salah seorang pengurus KDK yang menyatakan:

“Kami masih mengandalkan semangat para dai dan jejaring komunitas. Ke depan, penguatan media digital, kaderisasi dai muda, dan dukungan kelembagaan menjadi kebutuhan penting agar dakwah moderat dapat berkembang lebih luas.” (KDK6)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan praktik dakwah moderat tidak hanya bergantung pada kualitas materi dakwah, tetapi juga pada kapasitas organisasi dalam membangun sumber daya manusia, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan mengembangkan strategi komunikasi yang sesuai dengan perubahan karakter masyarakat urban.

Sintesis terhadap data wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa praktik manajemen dakwah KDK berlangsung melalui proses negosiasi otoritas religius yang terus berkembang di tengah fragmentasi sumber pengetahuan keagamaan, dinamika ruang digital, dan keterbatasan kapasitas organisasi. Temuan ini membentuk dimensi keempat dalam model *Urban Moderative Da'wah Management*, yaitu *Negotiation of Religious Authority*, yang menempatkan kemampuan organisasi dalam membangun legitimasi, mengelola perbedaan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai prasyarat penting bagi keberhasilan internalisasi moderasi beragama pada masyarakat urban.

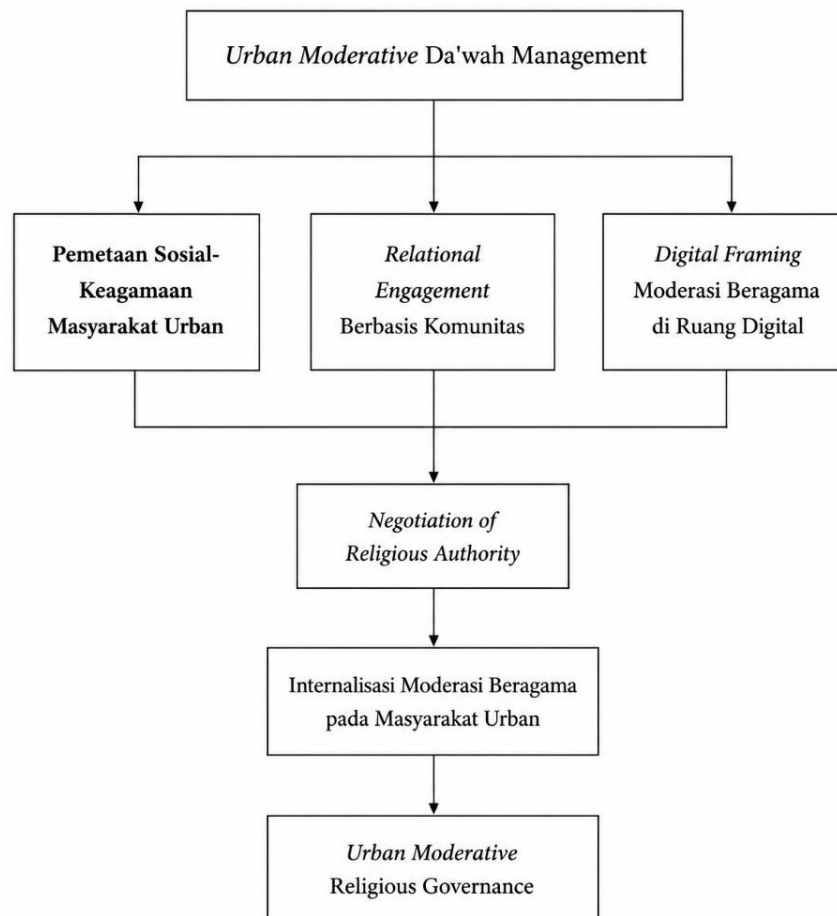
Model Urban Moderative Da'wah Management

Sintesis terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa praktik manajemen dakwah Komite Dakwah Khusus (KDK) MUI Sulawesi Selatan tidak berlangsung melalui satu strategi tunggal, melainkan melalui integrasi berbagai praktik organisasi yang saling berkaitan. Proses analisis dilakukan secara bertahap melalui *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* sehingga menghasilkan empat dimensi konseptual yang secara konsisten muncul pada berbagai sumber

data. Keempat dimensi tersebut kemudian diintegrasikan menjadi model *Urban Moderative Da'wah Management* sebagai temuan utama penelitian.

Model ini menunjukkan bahwa internalisasi moderasi beragama pada masyarakat urban merupakan proses organisasi yang bersifat dinamis dan berlapis. Proses tersebut diawali dengan pemetaan sosial-keagamaan masyarakat urban sebagai dasar penyusunan strategi dakwah. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, organisasi membangun *relational engagement* berbasis komunitas untuk menciptakan hubungan sosial yang dialogis dan partisipatif. Selanjutnya, proses internalisasi diperkuat melalui *framing* narasi moderasi beragama di ruang digital yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat urban, khususnya generasi muda. Pada tahap berikutnya, organisasi melakukan negosiasi otoritas religius melalui dialog dengan berbagai kelompok masyarakat dan penguatan legitimasi kelembagaan sehingga dakwah moderat dapat diterima di tengah pluralitas pandangan keagamaan.

Untuk memperjelas hubungan antardimensi yang membentuk praktik manajemen dakwah tersebut, model konseptual hasil sintesis penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Konseptual *Urban Moderative Da'wah Management*

Sumber: Hasil analisis peneliti (2025).

Gambar 1 menunjukkan bahwa keempat dimensi tersebut tidak bekerja secara linear, melainkan membentuk suatu sistem manajemen dakwah yang saling memperkuat. Pemetaan sosial-keagamaan menjadi fondasi dalam memahami karakteristik masyarakat sasaran. Informasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pengembangan *relational engagement* melalui

jejaring komunitas, yang kemudian diperluas melalui *digital framing* untuk membangun narasi moderasi beragama di ruang digital. Seluruh proses tersebut bermuara pada negosiasi otoritas religius yang memungkinkan organisasi mempertahankan legitimasi dakwah moderat di tengah dinamika masyarakat urban. Integrasi keempat dimensi tersebut menghasilkan proses internalisasi moderasi beragama yang pada akhirnya membentuk praktik *Urban Moderative Religious Governance* sebagai luaran dari model konseptual yang dikembangkan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai fungsi setiap dimensi dalam model tersebut, sintesis konseptual masing-masing dimensi disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Sintesis Konseptual Model *Urban Moderative Da'wah Management*

Dimensi	Fungsi Manajerial	Luaran
<i>Social-religious Mapping</i>	Mengidentifikasi karakteristik, kebutuhan, dan segmentasi masyarakat urban sebagai dasar penyusunan strategi dakwah	Strategi dakwah berbasis kebutuhan sosial masyarakat
<i>Relational Engagement</i>	Membangun hubungan sosial melalui komunitas, dialog partisipatif, dan pendampingan berkelanjutan	Kepercayaan, partisipasi, dan penerimaan masyarakat terhadap dakwah moderat
<i>Digital Framing</i>	Mengonstruksi narasi moderasi beragama melalui berbagai platform digital yang relevan dengan karakter masyarakat urban	Penyebaran nilai moderasi yang adaptif dan kontekstual
<i>Negotiation of Religious Authority</i>	Mengelola legitimasi kelembagaan dan dialog dengan berbagai aktor keagamaan dalam ruang sosial maupun digital	Penguatan moderasi beragama yang berkelanjutan dalam masyarakat urban

Sumber: Hasil analisis peneliti (2025).

Tabel 7 memperlihatkan bahwa setiap dimensi memiliki fungsi manajerial yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membentuk model *Urban Moderative Da'wah Management*. Pemetaan sosial-keagamaan menyediakan dasar penyusunan strategi dakwah, *relational engagement* membangun kedekatan sosial antara organisasi dan masyarakat, *digital framing* memperluas jangkauan internalisasi moderasi beragama melalui media digital, sedangkan *negotiation of religious authority* menjaga legitimasi organisasi di tengah kontestasi otoritas keagamaan. Dengan demikian, model yang dihasilkan penelitian ini tidak hanya menggambarkan tahapan pengelolaan dakwah, tetapi juga menjelaskan hubungan fungsional antardimensi yang membentuk mekanisme internalisasi moderasi beragama pada masyarakat urban.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik manajemen dakwah yang dijalankan oleh Komite Dakwah Khusus (KDK) Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan merefleksikan pergeseran penting dalam praktik dakwah Islam urban di Indonesia. Dakwah tidak lagi beroperasi semata sebagai mekanisme transmisi doktrin keagamaan, tetapi berkembang menjadi bentuk tata kelola sosial-keagamaan (*religious governance*) yang mengelola relasi sosial, membangun legitimasi religius, serta menegosiasikan moderasi

beragama dalam ruang urban yang plural dan terdigitalisasi. Dalam konteks ini, moderasi beragama tidak hadir sebagai kategori normatif yang diterima secara otomatis, melainkan diproduksi melalui proses sosial yang berlangsung secara dialogis, relasional, dan kontestatif (Fathurrohman, 2022; Kusnawan & Rustandi, 2021; Wadi, 2023). Temuan ini tidak hanya memperkuat pandangan bahwa moderasi beragama merupakan proses sosial, tetapi juga memperluas kerangka analisis yang ada dengan memosisikan internalisasi moderasi sebagai luaran dari tata kelola organisasi dakwah. Perspektif ini menggeser fokus pembahasan dari moderasi sebagai substansi normatif menuju moderasi sebagai proses organisasional yang dibentuk melalui strategi kelembagaan, pengelolaan relasi sosial, dan adaptasi terhadap dinamika masyarakat urban (Rofiqi et al., 2024; Hayati et al., 2025; Arsyad et al., 2025; Pratama & Harahap, 2024).

Dalam perspektif urban Islam, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa fragmentasi otoritas religius yang dipicu oleh media digital telah mengubah cara masyarakat urban memperoleh legitimasi keagamaan. Hasil ini menguatkan argumentasi mengenai meningkatnya pluralitas sumber otoritas religius di masyarakat Muslim kontemporer (Rahmiati, 2024; Hasibuan et al., 2023; Mandaville, 2007). Akan tetapi, penelitian ini memperhalus (*refines*) pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa organisasi dakwah tidak hanya beradaptasi terhadap perubahan konfigurasi otoritas religius, tetapi juga mengembangkan mekanisme *social-religious mapping* sebagai strategi manajerial untuk membaca karakter masyarakat sebelum merancang intervensi dakwah. Dengan demikian, *social-religious mapping* tidak sekadar menjadi tahap perencanaan program, tetapi berfungsi sebagai mekanisme organisasi yang menghubungkan perubahan konteks sosial dengan penyusunan strategi internalisasi moderasi beragama (Cesari, 2014).

Temuan mengenai *relational engagement* juga memberikan kontribusi teoretis yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya. Studi-studi terdahulu umumnya menjelaskan bahwa pendekatan komunitarian meningkatkan efektivitas dakwah melalui kedekatan emosional antara dai dan masyarakat (Fathurrohman, 2022; Qurrata'ayun et al., 2025; Jouili, 2015). Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan merekonseptualisasi (*reconceptualises*) hubungan sosial sebagai mekanisme utama internalisasi moderasi beragama, bukan sekadar sebagai strategi komunikasi dakwah. Moderasi tidak diterima semata-mata karena isi pesan dakwah, tetapi karena terbentuknya kepercayaan (*trust*), pengalaman kolektif, dan interaksi yang berlangsung secara berulang antara organisasi dakwah dan komunitas sasaran (Fathurrohman, 2022; Qurrata'ayun et al., 2025). Oleh karena itu, proses internalisasi nilai dalam masyarakat urban lebih tepat dipahami sebagai *relational internalization*, yaitu transformasi nilai yang berlangsung melalui hubungan sosial yang berkelanjutan, bukan melalui penyampaian doktrin secara satu arah. Interpretasi ini memperluas penerapan teori internalisasi nilai yang selama ini lebih banyak digunakan dalam konteks pendidikan formal dan transmisi norma institusional dengan menunjukkan bahwa proses tersebut juga tampak dalam praktik organisasi dakwah pada masyarakat urban (Ashoumi et al., 2023; Novianti et al., 2025; Susanto, 2023).

Aspek lain yang memperkaya literatur adalah temuan mengenai dakwah digital. Sebagian besar penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada perubahan media

komunikasi, meningkatnya penggunaan media sosial, atau popularitas pendakwah digital. Penelitian ini memperluas diskusi tersebut dengan menunjukkan bahwa kontribusi media digital terhadap moderasi beragama tidak semata ditentukan oleh keberadaan platform digital, tetapi oleh kemampuan organisasi melakukan *digital framing* terhadap narasi keagamaan dalam ekosistem algoritmik yang cenderung mempromosikan konten sensasional dan polarisatif (Rahmiati, 2024; Ulya, 2024; Göle, 2017). Dengan demikian, konsep *digital framing* yang dihasilkan penelitian ini menawarkan perspektif bahwa media digital perlu dipahami sebagai arena pengelolaan makna (*meaning management*), bukan hanya sebagai saluran komunikasi dakwah. Keberhasilan dakwah digital bergantung pada kemampuan organisasi membingkai pesan keagamaan agar tetap relevan dengan karakter masyarakat urban tanpa kehilangan substansi moderasi (Göle, 2017).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam masyarakat urban bukan merupakan proses yang sepenuhnya harmonis. Resistensi sebagian kelompok terhadap dakwah moderat mengindikasikan bahwa moderasi merupakan arena kontestasi makna sekaligus perebutan legitimasi religius. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa praktik dakwah selalu berkaitan dengan relasi kuasa dalam ruang publik, namun sekaligus memajukan (*advances*) pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa negosiasi otoritas religius merupakan fungsi manajerial organisasi yang secara langsung memengaruhi keberhasilan internalisasi moderasi beragama (Muchlis et al., 2023; Hanif, 2025; Siswanto, 2024). Dengan kata lain, legitimasi religius bukan sekadar konteks tempat dakwah berlangsung, melainkan salah satu mekanisme yang harus dikelola secara berkelanjutan agar moderasi beragama memperoleh penerimaan sosial (DeHanas, 2016; Cesari, 2014).

Secara konseptual, penelitian ini menghasilkan model *Urban Moderative Da'wah Management* yang terdiri atas empat dimensi utama, yaitu *social-religious mapping*, *relational engagement*, *digital framing*, dan *negotiation of religious authority*. Keempat dimensi tersebut tidak bekerja secara linear, melainkan membentuk suatu siklus pengelolaan dakwah yang saling memperkuat dalam proses internalisasi moderasi beragama pada masyarakat urban, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1. Model tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dakwah moderat diawali dengan pemetaan karakter sosial-keagamaan masyarakat, dilanjutkan dengan pembangunan relasi komunitas, penguatan narasi moderasi melalui media digital, serta pengelolaan legitimasi religius agar nilai-nilai moderasi memperoleh penerimaan yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Berbeda dengan konsep *community-based da'wah*, yang menitikberatkan pada pemberdayaan komunitas sebagai basis aktivitas dakwah, model *Urban Moderative Da'wah Management* memosisikan komunitas hanya sebagai salah satu dimensi dalam sistem manajemen dakwah yang lebih luas. Relasi komunitas dalam model ini tidak berdiri sendiri, tetapi didahului oleh proses *social-religious mapping* dan diintegrasikan dengan strategi komunikasi digital serta negosiasi otoritas religius. Dengan demikian, komunitas dipahami sebagai bagian dari mekanisme organisasi, bukan sebagai satu-satunya pusat transformasi dakwah (Mandaville, 2007; Wadi, 2023).

Demikian pula, model ini berbeda dari *participatory da'wah* yang berorientasi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas dakwah. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa partisipasi masyarakat tidak secara otomatis menghasilkan internalisasi moderasi beragama apabila tidak didukung oleh pemetaan kebutuhan sosial-keagamaan, pengelolaan jejaring komunitas, dan pembedayaan narasi yang sesuai dengan karakter masyarakat urban. Dengan kata lain, partisipasi diposisikan sebagai salah satu instrumen dalam sistem manajemen dakwah, bukan sebagai tujuan akhir proses dakwah (Mandaville, 2007; Cesari, 2014).

Model ini juga melampaui konsep *transformative da'wah* yang umumnya menitikberatkan pada perubahan perilaku atau kesadaran individu melalui aktivitas dakwah. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi tersebut tidak hanya bergantung pada interaksi antara pendakwah dan jamaah, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dalam mengelola strategi, membangun jejaring sosial, memanfaatkan ruang digital, dan mempertahankan legitimasi religius di tengah kontestasi masyarakat urban. Dengan demikian, perubahan individu dipahami sebagai luaran dari proses manajerial organisasi yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan (Mandaville, 2007; Jouili, 2015).

Sementara itu, dibandingkan konsep *religious governance* yang umumnya menjelaskan hubungan antara aktor keagamaan, negara, dan ruang publik pada tingkat makro, model *Urban Moderative Da'wah Management* menawarkan spesifikasi yang lebih operasional pada level organisasi dakwah. Model ini menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi manajemen organisasi diterjemahkan ke dalam mekanisme internalisasi moderasi beragama melalui empat dimensi yang saling terhubung, sehingga memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai proses pengelolaan dakwah moderat dalam masyarakat urban (DeHanas, 2016; Göle, 2017).

Dengan demikian, kebaruan utama penelitian ini tidak terletak pada identifikasi empat dimensi secara terpisah, karena masing-masing dimensi telah memperoleh perhatian dalam berbagai kajian sebelumnya. Kontribusi konseptual penelitian ini justru terletak pada integrasi keempat dimensi tersebut ke dalam satu mekanisme organisasi yang menjelaskan bagaimana moderasi beragama diinternalisasikan secara sistematis dalam masyarakat urban. Melalui model *Urban Moderative Da'wah Management*, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa keberhasilan dakwah moderat bukan merupakan hasil dari satu strategi tertentu, melainkan dari keterpaduan antara pembacaan konteks sosial, pengelolaan relasi komunitas, pembedayaan narasi digital, dan negosiasi legitimasi religius sebagai satu sistem manajemen organisasi yang saling berkaitan. Dalam pengertian tersebut, penelitian ini tidak hanya memperluas diskursus mengenai manajemen dakwah dan *religious governance*, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menjelaskan mekanisme internalisasi moderasi beragama pada organisasi dakwah dalam konteks masyarakat urban kontemporer (Cesari, 2014; DeHanas, 2016; Mandaville, 2007).

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi moderasi beragama pada masyarakat urban pada hakikatnya merupakan proses tata kelola organisasi dakwah, bukan semata-mata proses penyampaian doktrin atau komunikasi keagamaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi moderasi beragama ditentukan oleh kemampuan organisasi

dakwah dalam mengelola relasi sosial, membangun legitimasi religius, serta beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan ruang digital. Berdasarkan hasil penelitian, praktik dakwah Komite Dakwah Khusus (KDK) Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan menghasilkan model konseptual *Urban Moderative Da'wah Management* yang dibangun atas empat dimensi utama, yaitu *social-religious mapping*, *relational engagement* berbasis komunitas, *digital framing* moderasi beragama, dan *negotiation of religious authority*. Keempat dimensi tersebut bekerja secara terpadu sebagai mekanisme organisasi yang menjelaskan bagaimana moderasi beragama diinternalisasikan secara berkelanjutan dalam masyarakat urban.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian manajemen dakwah, moderasi beragama, dan *urban Islam* dengan menempatkan dakwah tidak hanya sebagai aktivitas komunikasi religius, tetapi sebagai bentuk *religious governance* yang mengintegrasikan strategi organisasi, jejaring komunitas, pengelolaan narasi digital, dan negosiasi otoritas religius. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif konseptual baru yang memperkaya diskursus mengenai transformasi organisasi dakwah dalam masyarakat Muslim urban kontemporer.

Secara praktis, model *Urban Moderative Da'wah Management* dapat menjadi kerangka acuan bagi Majelis Ulama Indonesia di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta organisasi dakwah lainnya dalam merancang program internalisasi moderasi beragama yang lebih adaptif terhadap karakter masyarakat urban. Model ini juga dapat dipertimbangkan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan strategi dakwah berbasis pemetaan sosial, penguatan jejaring komunitas, pengelolaan media digital, dan dialog dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memperkuat kohesi sosial serta mencegah berkembangnya polarisasi dan eksklusivisme keagamaan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Kementerian Agama dan lembaga pembinaan keagamaan dalam merumuskan kebijakan penguatan moderasi beragama yang lebih kontekstual sesuai dengan dinamika masyarakat perkotaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan desain *single instrumental case study* yang berfokus pada satu organisasi dakwah di Kota Makassar. Oleh karena itu, model yang dihasilkan belum dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada seluruh organisasi dakwah di Indonesia yang memiliki karakteristik kelembagaan, sosial, dan budaya yang beragam. Selain itu, penelitian ini lebih banyak merepresentasikan perspektif pengelola organisasi, dai, dan komunitas binaan sehingga belum mengakomodasi pengalaman organisasi keagamaan lain maupun aktor dakwah digital independen.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif pada berbagai organisasi dakwah, seperti MUI di daerah lain, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, maupun lembaga dakwah perkotaan lainnya untuk menguji transferabilitas model *Urban Moderative Da'wah Management* dalam konteks kelembagaan dan sosial-keagamaan yang berbeda. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan instrumen pengukuran bagi setiap dimensi model serta menguji hubungan antardimensi dan efektivitasnya melalui pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat validitas empiris model sekaligus mengembangkan

Urban Moderative Da'wah Management sebagai kerangka teoretis dalam kajian manajemen dakwah dan moderasi beragama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Komite Dakwah Khusus (KDK), atas dukungan, akses, dan keterbukaan informasi yang diberikan selama proses penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada para pengelola organisasi, dai, serta komunitas binaan yang telah bersedia menjadi informan dan meluangkan waktu untuk memberikan data serta pengalaman yang diperlukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aderus, A., Mase, R. A., Rahman, A., Syam, A., Subaeh, S. T. N. M., & Firman, F. (2024). Religious moderation and transnational Islamic ideology: Phenomena and implications in Indonesia. *Ulumuna*, 28(1), 485–509. <https://doi.org/10.20414/ujis.v28i1.969>
- Arsyad, A., Hasibuan, W. A., & Primadani, R. (2025). Manajemen lembaga dakwah FKUB dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Medan. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 3(4), 10–17. <https://doi.org/10.51178/khazanah.v3i4.2308>
- Ashoumi, H., Umamik, M. I., Milahudin, S., Zainuri, M., & Sa'diyah, C. (2023). Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dan implikasinya terhadap sikap sosial mahasiswa. *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 14(1). <https://doi.org/10.53915/jurnalkeislamandanpendidikan.v14i1.328>
- Azizy, J., Sihabussalam, S., & Desmaliza, D. (2022). Building a digital-based (post-pandemic) moderate Muslim urban community: Reflection on the interpretation of da'wah verses. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 27(2). <https://doi.org/10.32332/akademika.v27i2.5547>
- Burga, M. A., & Damopolii, M. (2022). Reinforcing religious moderation through local culture-based pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19879>
- Cesari, J. (2014). *The awakening of Muslim democracy: Religion, modernity, and the state*. Cambridge University Press.
- DeHanas, D. N. (2016). *London youth, religion, and politics: Engagement and activism from Brixton to Brick Lane*. Oxford University Press.
- Dermawan, A. (2023). Da'wah management science and its contributions towards religious moderation in Indonesia. *Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS)*, 7(1), 461–477. <https://doi.org/10.31436/alrisalah.v7i1.431>
- Fansuri, H. (2023). On the road of hijrah: Contesting identity through urban mobilities in contemporary Indonesian Muslims. *Archipel*, 106, 115–139. <https://doi.org/10.4000/archipel.3485>
- Fathurrohman, F. (2022). Internalisasi nilai moderasi beragama pada masyarakat multikultural. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1). <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.409>

- Fenwick, S. (2018). Eat, pray, regulate: The Indonesian Ulama Council and the management of Islamic affairs. *Journal of Law and Religion*, 33, 271–290. <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.23>
- Göle, N. (2017). *Islam and public controversy in Europe*. Routledge.
- Hanif, H. A. (2025). Moderasi beragama dan pengaruhnya terhadap *hubbul wathon* di lingkungan perguruan tinggi. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 6(1). <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss1.art9>
- Hasibuan, S., Efendi, E., Armanda, D., & Saifulloh, Y. (2023). Pola dan strategi dakwah dalam moderasi beragama. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(2), 229–244. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i2.2766>
- Hayati, Z., Putra, I. F., & Subarkah, M. A. (2025). Perkembangan Islam moderat di Indonesia dalam perspektif pendidikan moderasi beragama. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 3(2). <https://doi.org/10.62083/w9wxxv67>
- Hefni, W. (2020). Moderasi beragama dalam ruang digital: Studi pengarusutamaan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1–22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Husaini, H., & Islamy, A. (2022). Harmonization of religion and state: Mainstreaming the values of religious moderation in Indonesian da'wah orientation. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 7(1), 51–73. <https://doi.org/10.35673/ajhpi.v7i1.2128>
- Irama, Y., & Zamzami, M. (2021). Telaah atas formula pengarusutamaan moderasi beragama Kementerian Agama tahun 2019–2020. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 65–89. <https://doi.org/10.36781/kaca.v11i1.3244>
- Jouili, J. S. (2015). *Pious practice and secular constraints: Women in the Islamic revival in Europe*. Stanford University Press.
- Juhri, M. A., Assegaf, A., & Fauzi, D. (2023). Islam wasatiyya in the view of Majelis Ulama Indonesia. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 3(1), 41–53. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i1.6538>
- Kosim, N., Royhatudin, A., & Hidayatullah, A. (2024). Penguatan literasi moderasi beragama melalui platform digital dan media sosial di kalangan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 23(2). <https://doi.org/10.15408/kordinat.v24i2.45370>
- Kusnawan, A., & Rustandi, R. (2021). Menemukan moderasi beragama dalam kaderisasi dakwah: Kajian pada Pemuda Persatuan Islam Jawa Barat. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 5(1), 41–61. <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i1.2900>
- Mandaville, P. (2007). *Global political Islam*. Routledge.
- Mandaville, P. (2007). Globalization and the politics of religious knowledge: Pluralizing authority in the Muslim world. *Theory, Culture & Society*, 24(2), 101–115.
- Masrur, M., Zulfa, I. N., Afna, I. M., Putri, N. K., & Hasanah, N. (2025). Toleransi digital dan moderasi beragama Generasi Z di Indonesia: Analisis negosiasi nilai di ruang publik media sosial. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 765–780. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i2.125>

- Muchlis, L., Amra, A., Demina, D., Amran, S. H., Rezika, E., & B. S., I. A. (2023). Manajemen implementasi nilai-nilai moderasi beragama pada pondok pesantren dan sekolah di Kabupaten Tanah Datar. *ISLAMIKA*, 5(4). <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i4.3979>
- Muisulsel.com. (2022, April 22). *Pengurus Komite Dakwah Khusus MUI Sulsel dilantik, ini susunan pengurusnya*. <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/34285/pengurus-komite-dakwah-khusus-mui-sulsel-dilantik-ini-susunan-pengurusnya>
- Mulya, T. W., & Schäfer, S. (2023). Who belongs where? Geographies of (inter)religion and urban segregation in Surabaya, Indonesia. *Cities*, 141, 104476. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104476>
- Novianti, R., Saepudin, A., & Muhammad, G. (2025). Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada program pembinaan akhlak karimah berbasis masjid di SMA Pasundan 8 Bandung. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 5(2), 445–452. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v5i2.19330>
- Pagar, P., Akhyar, S., & Tunip, I. R. S. (2023). Religious moderation in Indonesia: A study on implementation patterns of the Indonesian Ulema Council (MUI). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(3), 11–29. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.2756>
- Prasetianti, I. G., Kuswanjono, A., Ali, I. Q., Afdhalia, A. N., & Faizah, F. (2025). The shifting religious authority of the Indonesian Ulema Council (MUI) in the dynamics of Islamic digitalization in Indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 22(2), 180–194. <https://doi.org/10.24239/jsi.v22i2.846>
- Pratama, T. A., & Harahap, N. (2024). Peran komunikasi interkultural dalam penguatan moderasi beragama pada masyarakat Kota Medan (Analisis FKUB di Medan). *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(2), 2081–2095. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.819>
- Qurrata'ayun, N. N., Ilham, I., & Ermalianti, E. (2025). Dakwah kultural sebagai wujud moderasi beragama: Studi pada masyarakat Desa Tajau Pecah Kalimantan Selatan. *ANWARUL*, 5(6), 891–902. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v5i6.7947>
- Rahmiati, H. (2024). Moderasi beragama di media sosial: Narasi inklusivisme dalam dakwah. *Journal of Religion and Film*, 3(2). <https://doi.org/10.30631/jrf.v3i2.16>
- Rizki, P. Z. A., & Muhdi. (2025). Islam wasathiyah dalam bingkai digital guna membangun narasi moderasi beragama. *Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 4(4), 585–596. <https://doi.org/10.47233/jpst.v4i4.4001>
- Rofiqi, R., Firdaus, M., Salik, M., & Zaini, A. (2024). Moderasi beragama: Analisis kebijakan dan strategi penguatan di Kementerian Agama Republik Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 16–36. <https://doi.org/10.36420/ju.v9i1.6544>
- Saputra, E., & Triantoro, D. A. (2021). Urban Muslim youth, pengajian communities and social media: Fragmentation of religious authorities in Indonesia. *Al-Qalam*, 27(2), 335–346. <https://doi.org/10.31969/alq.v27i2.1004>
- Setiawati, R., Rolando, D. M., Putra, R. A., & Koroglu, O. (2022). Da'wah among urban Muslims in Indonesia. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 27(2). <https://doi.org/10.32332/akademika.v27i2.5505>

- Siswanto, E. (2024). Dakwah dan moderasi beragama sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk pada masyarakat di Papua. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 20(1), 27–46. <https://doi.org/10.33754/miyah.v20i01.824>
- Suheri, S., & Nurrahmawati, Y. T. (2022). Moderasi beragama di era disrupsi digital. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1), 933–944. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.453>
- Susanto, A. B. (2023). Peran guru PAI dalam internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di SMP Qur'an Darul Fattah Bandar Lampung. *An Naba*, 6(2), 152–165. <https://doi.org/10.51614/annaba.v6i2.307>
- Syarief, F., Yusuf, M., & Tang, M. (2023). Moderasi beragama dan pendidikan Islam multikultural di Kota Makassar. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 4(3), 19–41. <https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alhikmah/article/view/5280>
- Ulya, Y. A. (2024). Communication strategies in Islamic da'wah: Opportunities and challenges in the era of artificial intelligence. *Feedback International Journal of Communication*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.62569/fijc.v1i2.35>
- Wadi, H. (2023). Manajemen dakwah dan moderasi beragama di kawasan wisata Mandalika Lombok Tengah. *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(2). <https://doi.org/10.20414/mudabbir.v4i2.8741>